



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : POLITEKNIK NEGERI MALANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. NANAK ZAKARIA
2. Jabatan : KETUA PRODI D4 JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL
3. NHK : 255009

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.950.000.000**

1. Tanah Seluas 1930 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 493.250.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA REBORN MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HADIAH Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000
5. MOTOR, HONDA CBR150R SEPEDA MOTOR Tahun 2015, WARISAN Rp. 10.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 4.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	466.424.026
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.914.174.026
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.914.174.026

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.